

KOMENTAR ANDA

Jangan cuma Cari Untung

JANGAN cuma cari untung, pikir dulu kebutuhan publik. 6285657070xxx

MEMANG operator hanya memikirkan diri sendiri. Seharusnya KPPU harus menindaklanjuti peraturan tersebut. Jangan sampai konsumen rugi besar. 628164982xxx

KENAPA Indosat tidak didenda? Indosat kan juga menaikan harga yang sama? 622270112xxx

PEMERINTAH juga telah menaikan pajak dari perusahaan itu. Mana tanggung jawab Ditjen Postel, Menkominfo, dan Presiden? 622270112xxx

SADARLAH wahai pebisnis telekomunikasi, keuntungan dengan menu-pu itu tidak halal alias haram sama juga korupsi! 622168577xxx

INDUSTRI telekomunikasi di Indonesia menjadi mahal di antaranya karena perangkat masih impor, topologi daerah yang saling berjauhan, dan kebijakan pemerintah yang tidak jelas. 622270720xxx

KPPU sudah belajar tentang interkoneksi? 62227073xxx

MASYARAKAT dirugikan Rp2,8 triliun oleh perusahaan telekomunikasi hasil ketetapan KPPU. Jika dana itu dikembalikan, bisa dipakai untuk beasiswa pendidikan. 623171527xxx

TERLALU menaikan konsumen, tapi malah merugikan. 628153583xxx

HARUS dikembalikan hak-hak konsumen yang ditipu enam operator seluler dan pihak-pihak yang berwajib harus diusut tuntas. 628169620xxx

SEBAIKNYA pemerintah sija saja keuntungan operator sekitar 70%-75% hasil penipatan tersebut untuk kas negara. 62815282040xxx

APA memang rakyat Indonesia selalu tertipu dan terjahat? 622913376xxx

TOLONG pihak operator telekomunikasi berbuat baik bagi konsumen jangan selalu merugikan kami sebagai konsumen. Saya secara pribadi merasa dirugikan oleh pihak operator telekomunikasi. Saya merasa dirugikan kalau saya mau menelpon selalu ada gangguan terus baik siang dan malam

TEREBIH kalau malam dan pagi hari. 6285652353xxx

PERUSAHAAN pebisnis kartel jasa telekomunikasi dan lain-lain yang mencurangi masyarakat. Kami doakan semoga cepat bangkrut. Amin. 6285654541xxx

SEMUAKA kartel ada di negeri ini. Mereka ada karena tidak diawasi pemerintah. 628152037xxx

SATU hal lagi. Operator juga harus mengembangkan teknologinya supaya konsumen semakin senang. 628164982xxx

OPERATOR enggak kooperatif. Tarif naik-turun kayak harga sembakso. Pemerintah lebih tegas dulu. 6281545752xxx

INILAH area bisnis yang masih bisa diguluti para mafia. 6285650490xxx

EKONOMI Pancasila jauh-jauh hari sudah melarang monopoli dan kartel di Indonesia. Karena praktik itu kejam sekali dan tidak ada perikemusiaan. Beliau Rp8 dijual kepada rakyat Indonesia Rp350. Artinya, jasa SMS untaungnya 44 kali alias 4.400%. Itu dosa besar! 6285404200xxx

PERUSAHAAN Telkom harus diberi sanksi kembalian uang rakyat dan dihukum. Rakyat mungkin setuju jika kelebihan tarif tersebut diserahkan negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur. 628125971xxx

KENAPA perancangan pada Telkom sel perhitungannya per detik, mahal amat. Negara tidak memaki saja per menit, misalnya 1 menit Rp1 tanpa syarat neko-neko. Terakhir, kenapa di Telkom pelanggan diwajibkan membayar komitmen sebesar Rp10 ribu selain abonemen per bulan. Hal itu terjadi di Telkom Raha-Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon diadakan imbauan untuk yang berwenang kepada Telkom Raha. 6285253942xxx

KENAPA operator Telkom sel bisa setega itu terhadap pelanggannya? Kita sebagai konsumen sangat dirugikan. Dari Albar di Masamba. 6281342157xxx

Di mana peran pemerintah kita ini? Katanya melindungi hak konsumen. 6281347239xxx

4 Kirimkan tanggapan dan komentar Anda melalui SMS atas program Bedah Editorial di Metro TV pukul 06.30 kemarin

EDITORIAL

MINGGU, 22 JUNI 2008 - TERBIT DI MEDIA INDONESIA

Kartel SMS yang Menghambat Pertumbuhan

PERSEKONGKOLAN yang merugikan masyarakat dapat dilakukan siapa saja, termasuk korporasi. Praktik kesepakatan harga atau kartel oleh enam operator telepon seluler dalam bisnis layanan pesan pendek (SMS) adalah salah satu contohnya.



Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan enam operator telekomunikasi bergerak, yakni PT Telkomsel, PT Excelkomindo Pratama (XL), PT Telkom Tbk (Flexi), PT Bakrie Telecom (Esia), PT Mobile-8 Telecom Tbk (Fren), dan PT Smart Telecom (Smart) sebagai pelaku kartel. Mereka adalah para pihak yang dinyatakan telah merugikan konsumen Rp2,827 triliun, melalui kesepakatan untuk menetapkan harga SMS jauh di atas kewajaran.

Itulah praktik tidak terpuji yang patut disesalkan. Selain merugikan masyarakat, praktik itu sejatinya menghambat pengembangan bisnis telekomunikasi bergerak secara keseluruhan.

Itu juga menjadi indikasi betapa operator menjalankan bisnis secara tidak kompetitif dan tidak kreatif. Yang jauh lebih buruk daripada itu adalah selain memanipulasi keamanan konsumen tanpa peduli etika bisnis, praktik bisnis tersebut melawan arus perkembangan telekomunikasi bergerak di level global. Itu jelas kecenderungan yang tidak sehat.

Yang terjadi pada level global adalah konvergensi antara telekomunikasi bergerak dan internet. Para pelaku bisnis bersaing meningkatkan layanan content, mengembangkan produk kreatif berbasis data pada jaringan pita lebar atau broadband, serta menjadikan biaya percapakan dan SMS bukan sekadar semakin murah, melainkan menuju titik nol dalam soal biaya. Percapakan dan SMS hanyalah paket kecil

bagian dari bisnis.

Di Indonesia, kecenderungan itu tidak berlangsung. Operator malah berkreasi dan mengandalkan bisnis hanya pada biaya percapakan dan SMS.

Yang terjadi adalah kemandekan dalam pengembangan bisnis telekomunikasi bergerak. Semestinya, operator belajar atas kesuksesan mereka sendiri. Bila mereka sukses mengedukasi publik sehingga percapakan dan SMS via ponsel kini menjadi kelaziman, pola sejenis mestinya dapat dilakukan untuk membudayakan penggunaan teknologi generasi ketiga atau 3G serta teknologi lain yang lebih mutakhir, sekaligus membuatnya terjangkau secara biaya.

Pertumbuhan pun dapat diraih kembali melalui kartel.

Terpatih bila masyarakat menuntut ganti rugi kepada operator dengan melayangkan class action.

Harapannya, operator tidak sewenang-wenang terhadap pengguna jasa, sekaligus mendorong mereka jauh lebih kreatif dalam berbisnis.

Pemerintah memang masih harus melengkapi infrastruktur bidang telekomunikasi bergerak. Tetapi, operator juga harus lebih sensitif terhadap konsumen.

Pemerintah tidak perlu ragu menerbitkan izin masuk teknologi baru seperti wimax (world interoperability for microwave access) agar iklim usaha di bidang telekomunikasi bergerak jauh lebih kompetitif. Dengan demikian konsumen tak harus membayar biaya percapakan dan SMS. Telekomunikasi bergerak adalah jalan raya dan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi global abad ke-21. Pelaku bisnis bidang ini sudah seharusnya mewujudkan hal itu dengan persaingan sehat. Bukan mengandalkan cara-cara terbelakang dalam meraih untung melalui kartel, menghambat pertumbuhan, dan membebani masyarakat.

KOMENTAR ANDA

Tindak Tegas Operator Seluler

MASALAH kartel di Indonesia sudah cukup lama. Pemerintah harus berani dan lebih tegas. Ini sudah merugikan konsumen. 6285259971xxx

SATINYA pemerintah untuk bertindak. Jangan pura-pura tidak tahu. 6281270167xxx

BAGAIMANA mau menuntut kerugian konsumen? Penegak hukum negara kita saja koruptor dan komisaris semua operatonya pejabat negara. 62811665xxx

JANGAN saling menyalahkan karena kita cara berpikirnya sama. Biaya tinggi karena untuk menyoqok tahu! 6285736501xxx

BAGAIMANA kalau Rp2,8 triliun tersebut dibelikan teknologi telekomunikasi yang murah untuk rakyat! 6285255734xxx

KEPADA operator seluler Indonesia, bagaimana mau mau kalau tarif seluler selalu berubah tidak menentu, tarif telepon tiap menit tidak tetap, SMS-nya selalu mahal berdasarkan karakter. Tarif seluler makin memperkaya operator tanpa memikirkan konsumen sebagai pengguna jasa. 6281347308xxx

BERAPA juta rakyat harus dibodohi. Sanksi apa yang harus dikenakan kepada operator. YLKI tolong bantu publik dong. Jangan diam saja. 6285215649xxx

INI adalah penipuan = korupsi = kriminal = pidana. 6281385737xxx

KARTEL di Indonesia banyak bohongnya. Pemerintah harus bertindak tegas. 6281534033xxx

KOMUNIKASI adalah akses publik ke kesejahteraan! Kok, dizalimi operator SMS! 628161804xxx

PEMERINTAH sebagai regulator menindak tegas pelaku bisnis telekomunikasi. 628125406xxx

RATA-RATA operator seluler perampok dan pembohong. 6281340151xxx

KENAPA kita sudah bayar abonemen telepon setiap bulan naki tidak pakal, namun ketika kita mengguna-

kan, jumlah pemakaian ditambah abonemen dikalikan 10% untuk pajak. Menurut saya, ini pembohongan publik. Kenapa menurut saya, jumlah yang kita pakai dikalikan 10% lalu jangan lagi biaya abonemen dikalikan pajak karena sudah membayar konsumen. Maju terus Metro TV. 6281533153xxx

PENIPUAN lewat SMS betul-betul biadab. Praktik semacam itu harus dihukum dengan tegas. Harus diadili dan kejahatan publik. Harus diadili. 6285259971xxx

INDONESIA surga bagi segala usaha hanya bermaksud penipuan yang dilakukan perusahaan-perusahaan skala besar seperti Temasek. Bahkan BUMN-BUMN kita juga kanibal. Kalau mau, tuntut mereka secara hukum. 6281340528xxx

PEMERINTAH harus menyelidikinya jangan sampai merugikan rakyat. 6285263095xxx

PARA pengusaha yang sudah melanggar etika ekonomi harus dihukum seberat-beratnya. 6281350296xxx

KEJAMNYA penaikan harga BBM lebih kejam dari SMS. 6281534738xxx

PEMERINTAH harap memberi sanksi kepada operator dengan menanganinya dengan pulsa gratis kepada pelanggan selama setahun. 628287013xxx

SEKITAR dua tahun lalu, saya sudah tiga kali telepon langsung operator Telkomsel menanyakan tentang kartel (harga telepon dan SMS). Ternyata baru sekarang diangkat. 6281345949xxx

SEHARUSNYA dibuat aturan yang mengatur bisnis seperti ini. 6282544043xxx

BAGAIMANA cara mereka merugikan pelanggan? Tolong dibuka modulusnya. 628126305xxx

TINDAK tegas saja dan sekarang berikan tarif yang sesuai. 6285669418xxx

KATANYA Simpati Pede lebih murah. Kok, biayanya lebih mahal daripada Simpati yang biasa? 6281374564xxx

4 Kirimkan tanggapan dan komentar Anda melalui: http://www.mediaindonesia.com

OPINI

Mengoptimalkan Kebijakan Trickle Down Effect

Oleh **Fithra Faisal Hastiadi**
Kandidat Master dari School of Media and Governance, Keio University Japan

PERBAGAI diskursus mengenai kebijakan trickle down effect seakan menjerus pada sebuah alih stigma yang diamini secara bersama-sama. Setiap topik atau bahasan mengenai prinsip trickle down effect mestiberjuga pada sikap penghakiman yang berat sebelah. Pengusung kebijakan ini mungkin akan menjadi sasaran empuk para penganut paham post development untuk dilakukikan secara membabi buta. Segala ungkapan bernuansa colan semisal pro status quo hingga anti rakyat menjadi santapan sehari-hari. Perlakuan ini mungkin sebuah justifikasi yang cukup rasional mengingat sejarah telah bercerita mengenai kegagalan kebijakan ini dalam mengangkat kesejahteraan rakyat banyak. Sebab, alih-alih meratakan pendapatan, yang terjadi justru penumpukan modal pada satu kelompok elite yang biasa kita kenal sebagai para konglomerat. Karena itu, tidaklah salah jika kemudian kebijakan trickle down effect ini lebih dikenal sebagai kebijakan konglomerat. Ungkapan ini kemudian lebih sering diposisikan sebagai istilah politik yang bernuansa retorisi. Upaya pengginggiran opini menjadi sesuatu yang sah selama hal itu ditunjang oleh bukti yang sahih. Adalah upaya penyesaian jika usaha untuk mengginggirkan publik lebih didasari emosi yang membunah.

Prinsip kebijakan trickle down effect pada prinsipnya merupakan kebijakan yang memosisikan para kaum berpujanya sebagai

kelas yang diutamakan dalam hal menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Dengan dibukanya akses dan pendanaan secara menyeluruh terhadap segala aktivitas maka investasi domestik diharapkan akan berjalan dengan berlipat dengan semakin gemaynya fokus pada sektor bisnis infrastruktur serta pasar keuangan. Dengan demikian, pada gilirannya skema ini akan menciptakan sebuah struktur kapasitas produksi yang meningkat. Produksi yang menggeliat akan mengginggirkan harga-harga pada tingkat yang lebih rendah dan menciptakan lapangan kerja untuk para kelas menengah dan menengah ke bawah.

Skema ini berjalan dalam sebuah ide dasar, pendapatan (income) dapat difungsikan melalui tiga jalur utama yaitu pajak, permintaan domestik, dan tabungan. Pemberdayaan pendapatan melalui sektor pajak tentu akan menggerakkan sektor investasi publik. Investasi publik ini bisa berupa pengembangan kegiatan pariwisata, pembangunan infrastruktur (jalan raya, pelabuhan, dan kelistrikan), investasi sektor pertanian (pembukaan jalur irigasi terpadu dan mekanisasi), serta investasi pada pengembangan sumber daya atau energi alternatif. Investasi pada sektor-sektor ini tentunya akan menarik para investor baik domestik maupun asing untuk ikut berperan serta dalam pembangunan mengingat daya tarik dari lokasi industri yang sudah dipenuhi oleh berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran berbisnis. Celat industri-industri utama pada akhirnya akan memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu dari sisi yang lain, me-

ningkatnya pendapatan akan menaikkan proporsi permintaan domestik yang dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berjalan atau sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor konsumsi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir. Jalur pemberdayaan terakhir adalah melalui tabungan. Meningkatkan pendapatan akan memperbesar proporsi pendapatan yang dapat ditabung. Dana dalam tabungan kemudian dapat difungsikan melalui sistem perbankan nasional untuk kemudian disalurkan bagi kebutuhan investasi swasta. Peningkatan investasi swasta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai skema yang dijalanikannya. Sebagai kesimpulan, mekanisme transmisi ini tentunya akan memberikan dampak yang diberikan terhadap kelompok menengah ke atas maupun memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang menetes ke bawah, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan dikinikam secara luas oleh masyarakat.

Disfungsi kebijakan Dengan skema ide sebagaimana telah dijabarkan di atas, kebijakan trickle down effect dalam implementasinya seakan bertepatan pada kondisi yang tidak semestinya. Berencana penelitian yang ditujukan untuk menganalisis akar permasalahan tak kunjung mendapati jawaban yang memadai. Vonis yang ada pun terkesan salah alamat, korupsi

dianggap menjadi biang keladi dan menjadi sumber pengisian yang berlaku trickle up dan ditabihkan sebagai paradoks pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, yang berakibat pada melambarnya jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Korupsi memang melanggar batas norma, sebagaimana korupsi memang memuakkan. Premis ini berujung pada kesimpulan bahwa korupsi mengerdikan pemerintah nasional. Anggapan ini boleh jadi benar apabila hasil korupsi mengalir ke luar negeri. Tetapi, akan beda hasilnya jika harta hasil korupsi diinvestasikan ke dalam negeri. Hal ini sejalan dengan asumsi yang telah dijabarkan panjang lebar di atas mengenai skema trickle down effect yaitu investasi domestik. Dalam skala yang ekstrem dapat dikatakan bahwa pelaku megakorupsi tidak akan merugikan negara selama mereka berinvestasi di negeri ini. Hal ini tentunya bukan untuk menjustifikasi perubahan korupsi karena secara



moral korupsi merupakan perbuatan laka yang patut mendapat ganjaran yang paling kejam. Akan tetapi, pemberantasan korupsi masih dinilai sebagai perbuatan revolusioner dan penuh perhitungan politik. Pertanyaannya adalah, seberapa lama sustainabilitas dari pembangunan ekonomi akan bertahan ditengah ketidakepastian politik? Sebuah ungkapan kelesoran dari ekonom kenamaan Inggris John Maynard Keynes kiranya bisa dilatarkan: how long is the long run? In the long run we are all dead.

Solusi yang optimal untuk membuka peluang dana-dana yang beredar di dalam negeri untuk tidak lari lintas kemudain hilang adalah melalui sistem insentif yang menarik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah jawabannya. Terdapat empat kendala utama yang dianggap menghambat iklim investasi yang kondusif yaitu inefisiensi birokrasi, regulasi ketenagakerjaan dan kepastian yang kurang menentu, kurangnya insentif pajak, serta ketidaksiapan infrastruktur pendukung investasi.

Rendahnya investasi baru juga disebabkan oleh belum tuntasnya produk hukum, ekonomi biaya tinggi (banyaknya pungutan liar), birokrasi yang panjang, terbatasnya pengalangan pemerintah dalam menstimulus perekonomian serta terbatasnya pembiayaan perbankan. Di sinilah seharusnya pemerintah berperan.

4 PARTISIPASI OPINI redaksi@mediaindonesia.co.id atau optimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105 (Maksimal 7500 karakter tanpa spasi. Serikan nama, alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).